

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Sistem

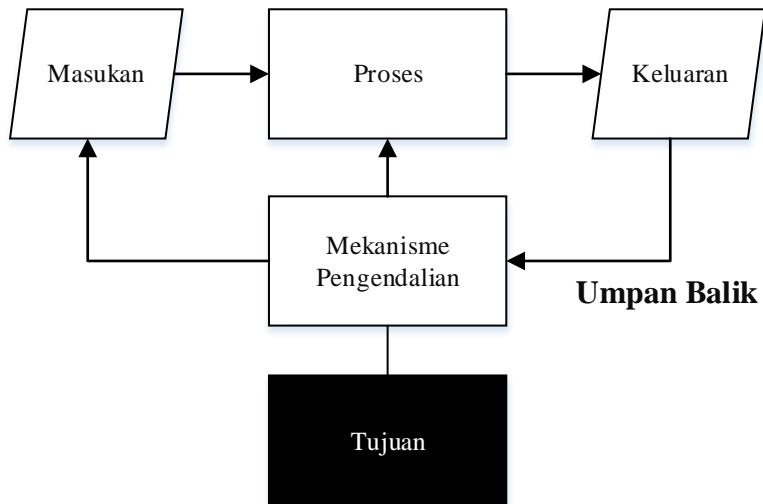
Pada dasarnya, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai gambaran, jika dalam sebuah sistem terdapat elemen yang tidak memberikan manfaat dalam tujuan yang sama, maka elemen tersebut dapat dipastikan bukanlah bagian dari sebuah sistem [3, p.54].

Ada dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut: suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama – sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan sasaran tertentu [4, p.23].

Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai berikut: sistem adalah kumpulan dari elemen – elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu [4, p.23].

2.1.1. Elemen Sistem

Terdapat beberapa elemen yang membangun sistem yaitu tujuan, masukan, keluaran, proses, mekanisme pengendalian dan umpan balik seperti pada Gambar 2.1 memperlihatkan hubungan antar elemen [3, p.54].



Gambar 2. 1 Elemen Sistem

(Sumber : Pengenalan Sistem Informasi [3, p.54])

2.1.1.1. Tujuan

Setiap sistem memiliki tujuan (*goal*), entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda – beda [3, p.55].

2.1.1.2. Masukan

Masukan (*input*) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal – hal berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak [3, p.56].

2.1.1.3. Keluaran

Keluaran (*output*) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya [3, p.57].

2.1.1.4. Proses

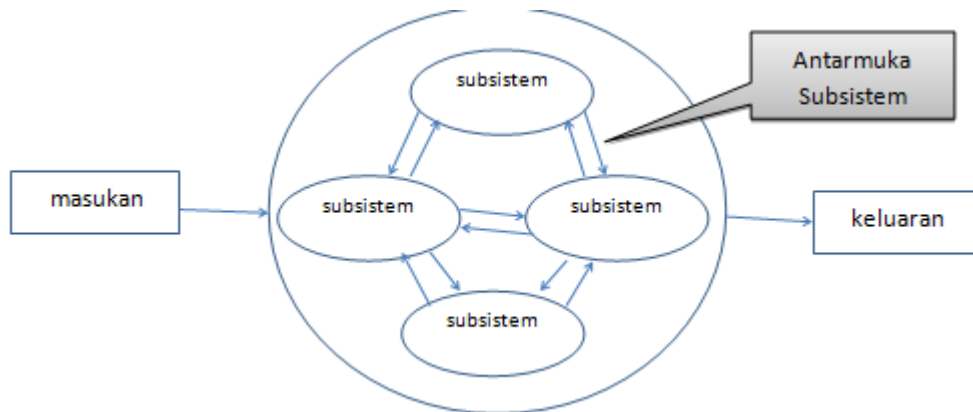
Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi bisa juga berupa hal – hal yang tidak berguna misalnya saja sisa pembuangan atau limbah [3, p.56].

2.1.1.5. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik

Mekanisme pengendalian (*control mechanism*) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur sistem agar berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam bentuk sederhana, dilakukan perbandingan antara keluaran sistem dan keluaran yang dikehendaki. Jika terdapat penyimpangan, maka dilakukan pengiriman masukan untuk melakukan penyesuaian terhadap proses supaya keluaran berikutnya mendekati standar. Bila penyebab penyimpangan terletak pada proses, maka prosesnya yang diperbaiki [3, p.57].

2.1.2. Antarmuka Sistem

Sebagaimana telah diketahui, sebuah sistem umumnya terdiri atas sejumlah subsistem [3, p.61]. Subsistem merupakan sistem – sistem yang berada dalam sebuah sistem [3, p.60]. Masing – masing subsistem yang memiliki batas tersendiri ini saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama [3, p.61].



Gambar 2. 2 Antarmuka subsistem

(Sumber: Pengenalan Sistem Informasi [3, p.62])

Garis – garis yang menghubungkan sistem pada gambar diatas disebut antarmuka (*interface*) atau penghubung subsistem. Antarmuka subsistem merupakan hal yang penting, sebab tanpa antarmuka ini sistem hanya berisi sekumpulan subsistem yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan. Bayangkan jika dalam sebuah perusahaan, antara bagian produksi dan bagian teknologi

informasi tidak berhubungan. Barangkali yang terjadi pihak teknologi informasi akan membangun sistem yang tidak diperuntukkan untuk menangani masalah pada bagian produksi, tetapi menangani masalah yang telah berlalu [3, p.62].

Secara prinsip, antarmuka sistem berupa masukan dan keluaran. Dalam prakteknya, sebuah subsistem bisa saja hanya memberikan keluaran atau hanya menerima masukan [3, p.62]. Pada prakteknya, sebuah antarmuka tidak sekedar menyatakan aliran data, melainkan juga melaksanakan suatu proses [5, p.64].

2.1.3. Klasifikasi Sistem

2.1.3.1. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik

Sistem abstrak (*abstract system*) adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep. Misalnya, sistem teologi yang berisi gagasan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Sistem fisik (*physical system*) adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat. Misalnya, sistem komputer, sistem sekolah, sistem akuntansi, dan sistem transportasi [3, p.64].

2.1.3.2. Sistem Deterministik dan Probabilistik

Sistem deterministik (*deterministic system*) adalah suatu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Misalnya, sistem komputer. Sistem probabilistik (*probabilistic system*) adalah sistem yang tak dapat diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas. Misalnya, sistem arisan dan sistem sediaan. Kebutuhan rata – rata dan waktu untuk memulihkan jumlah sediaan dapat ditentukan, tetapi nilai yang tepat untuk sesaat tidak dapat ditentukan dengan pasti [3, p.64 – 65]

2.1.3.3. Sistem Tertutup dan Terbuka

Sistem tertutup (*closed system*) adalah sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Dengan kata lain, sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya, reaksi kimia yang terisolasi. Selain sistem yang tertutup, terdapat pula sistem yang relatif tertutup. Ciri – ciri sebuah sistem yang relatif tertutup, antara lain sistem yang hanya mempunyai masukan dan keluaran yang tertentu, terkendali, dan gejala diluar sistem

(lingkungan) tidak mempengaruhinya. Misalnya, SPMB (sistem penerimaan mahasiswa baru) di lingkungan universitas negeri [3, p.65].

Sistem terbuka (*open system*) adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ciri – cirinya, sistem menerima masukan yang diketahui, yang bersifat acak, maupun gangguan. Selain itu, umumnya sistem melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Pada umumnya, sistem perusahaan dagang merupakan contoh sistem yang terbuka [3, p.65].

Sistem persediaan barang yang ditangani oleh komputer dapat berbentuk sistem yang terbuka ataupun relatif tertutup. Sebagai contoh, penentuan pemesanan kembali barang dapat ditentukan secara manual (oleh manusia) ataupun oleh komputer itu sendiri. Jika penentuannya dilakukan oleh manusia, sistem tersebut tergolong sebagai sistem terbuka. Namun, jika penentunya adalah komputer, sistem tergolong sebagai sistem tertutup [3, p.66].

2.1.3.4. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia

Sistem alamiah (*natural system*) adalah sistem yang terjadi karena alam (tidak dibuat oleh manusia). Misalnya, sistem tata surya. Sistem buatan manusia (*human made system*) adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Misalnya, sistem komputer dan sistem mobil [3, p.66].

2.1.3.5. Sistem Sederhana dan Sistem Kompleks

Berdasarkan tingkat kerumitannya, sistem dibedakan menjadi sistem sederhana (misalnya sepeda) dan sistem yang kompleks (misalnya manusia) [3, p.67].

2.1.4. Analisis Sistem

Tahapan analisis sistem dimulai karena adanya permintaan terhadap sistem baru. Permintaan dapat datang dari pihak eksekutif yang melihat adanya masalah atau menemukan adanya peluang baru. Tujuan utama analisis sistem adalah untuk menentukan hal – hal detail tentang yang akan dikerjakan oleh sistem yang diusulkan (dan bukan bagaimana caranya). Analisis sistem mencakup studi kelayakan dan analisis kebutuhan [3, p.400].

Studi kelayakan digunakan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan solusi yang diusulkan. Tahapan ini berguna untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tersebut benar – benar dapat dicapai dengan sumber daya dan dengan memperhatikan kendala yang terdapat pada perusahaan serta dampak terhadap lingkungan sekeliling [3, p.400].

Analisis kebutuhan dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan adalah spesifikasi yang rinci tentang hal – hal yang akan dilakukan sistem ketika diimplementasikan. Spesifikasi ini sekaligus dipakai untuk membuat kesepakatan antara pengembang sistem, pemakai yang kelak menggunakan sistem, manajemen, mitra kerja yang lain (misalnya auditor internal) [3, p.400 – 401].

Analisis kebutuhan ini diperlukan untuk menentukan keluaran yang akan dihasilkan sistem, masukan yang diperlukan sistem, lingkup proses yang digunakan untuk mengolah masukan menjadi keluaran, volume data yang akan ditangani sistem, jumlah pemakai dan kategori pemakai, serta kontrol terhadap sistem [3, p.401].

2.2. Konsesi

Konsesi merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum yang mana pekerjaan tersebut merupakan tugas pemerintah tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraan kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah [5, p.18].

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan [5, p.18].

Izin menurut Prof. Bagir Manan merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin khusus yaitu persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang [5, p.18 – 19]. Izin yang dimaksud yaitu :

- a. Dispensi adalah merupakan penetapan yang bersifat deklaratif, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon [5, p.19].
- b. Linsesi adalah izin untuk melakukan suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan [5, p.19].
- c. Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, ijin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensionaris walaupun terbatas dapat menimbulkan masalah politik dan social yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahkan kampung, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana lainnya [5, p.19].

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge yang disunting Philipus M.Hadjon mengemukakan perizinan untuk izin dalam arti luas, sedangkan izin dalam arti sempit disebut “ izin” saja membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit, yaitu sebagai berikut [5, p.19 – 20]:

- a. Izin dalam arti luas (perizinan) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan [5, p.20].

- b. Sedangkan izin dalam arti sempit disebut izin saja. Izin dalam arti sempit dibedakan dengan bentuk-bentuk perizinan lainnya seperti dispensasi, konsesi, rekomendasi, tanda daftar, surat persetujuan dan pendaftaran [5, p.20].

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan A.M. Donner seperti dikutip Amrah Muslimin yang mengemukakan perizinan (*vergunningen*) dibedakan dalam 3 (tiga) kategori, yakni lisensi, dispensasi, dan konsesi [5, p.20].

Pembedaan perizinan dengan izin secara normatif ditemukan pada Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) PP Nomor 25 Tahun 2000, dimana izin ditetapkan sebagai bagian perizinan yang harus dipenuhi dalam melakukan usaha dan atau kegiatan. Pandangan ini juga dikemukakan oleh Van Praag dalam bukunya yang berjudul “*Algemeen Nederlands Administratief Recht*” mengemukakan bentuk-bentuk persetujuan untuk melakukan sesuatu dari Pemerintah dapat berupa izin, persetujuan, pemberian kuasa, konsesi, dispensasi, pembebasan dari hukuman pembebasan dari kewajiban dan sebagainya (*De hier bedoelde vormen worde aangeduid onder verschillende benamingen, zool vergunning, verlof, machtiging, concessie, dispensatie, vrijstelling, onthffing, etc*) [5, p.20] .

Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Van der Pot yang membedakan perizinan dalam 3 (tiga) klasifikasi yakni [5, p.21]:

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan tersebut [5, p.21].
- b. Izin (*verguuning*) adalah bila pembuat peraturan tidak umumnya melarang perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin [5, p.21].
- c. Konsesi adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang penting bagi umum yang ditetapkan dengan turut campurnya dari pemerintah [5, p.21].

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Konsesi dapat didefinisikan sebagai suatu kontrak dimana pemberi hibah penerima hak untuk membiayai, membangun dan mengoperasikan fasilitas atau peralatan tertentu, untuk kepentingan umum, untuk jangka waktu tertentu, setelah itu fasilitas atau peralatan tersebut akan ditransfer ke pemberi. Untuk melaksanakan suatu konsesi diperlukan adanya suatu kontrak kerjasama yang melibatkan berbagai pihak dengan menggunakan beberapa skema kerjasama diantaranya adalah *Build Operation and Transfer* (BOT) [5, p.21].

Konsesi, setelah mengidentifikasi kebutuhan fasilitas, pemerintah, memberikan konsesi kepada pemilik konsesi. Pemegang konsesi mengambil tanggungjawab pengembangan (merancang, pembiayaan dan membangun), memelihara dan mengoperasikan fasilitas, atas nama *principal*. Para pemegang konsesi adalah pemilik fasilitas selama masa konsesi dan menyadari keuntungan dari investasi awal melalui penggunaan fasilitas [5, p.24].